

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berada pada posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional yang membawa keuntungan tersendiri dalam menyokong perekonomian daerahnya. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2016 sebesar Rp 628.394,16 milyar yang tergolong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor pertanian sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai (21,65%). Selanjutnya sektor industri pengolahan (19,98%), sektor perdagangan (17,89%), sektor konstruksi (13,40%) dan sektor-sektor lain memberikan total kontribusi sebesar 27,08% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor tersebut menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (Badan Pusat Statistik Sumut tahun 2016).

Perekonomian suatu wilayah juga dapat dilihat dari adanya tingkat inflasi yang menggambarkan stabilitas perkenomian. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga barang yang berlaku di suatu wilayah tersebut. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi disebabkan dengan adanya konsumsi masyarakat yang meningkat dan juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat sejalan dengan meningkatnya

permintaan agregat terhadap suatu barang tersebut. Berdasarkan teori permintaan, bila permintaan naik maka harga juga akan naik. Dengan naiknya harga barang disebut dengan inflasi maka produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya salah satunya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan input yang dapat meningkatkan output). Dengan demikian jumlah pengangguran akan berkurang bila produsen melakukan penambahan jumlah tenaga kerja (Sukirno,2004).

Tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah dapat menggambarkan bagaimana keadaan tenaga kerja di daerah tersebut. Di negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya diikuti oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi akan tetapi diikuti juga oleh semakin berkurangnya tingkat pengangguran di negara tersebut. Persentase jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara secara umum mengalami penurunan yaitu 6,23% tahun 2014, 6,71% tahun 2015 dan menjadi 5,84% di tahun 2016. Lapangan pekerjaan yang memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran tersebut adalah sektor pertanian sebesar 44,50% dan sisanya bersumber dari sektor lainnya. Dengan demikian permasalahan pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dapat diturunkan dengan adanya pengembangan sektor pertanian yang juga memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian (Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2016).

Sektor pertanian yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan pengaruh besar dalam hal meningkatkan perekonomian, pendapatan dan

penyerapan tenaga kerja. Khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian tidak terlepas dari adanya peranan pemerintah yang mendukung dalam perkembangan sektor tersebut. Antara lain dengan kebijakan pemerintah membantu dalam merealisasikan investasi atau penanaman modal baik dari pihak asing maupun dalam negeri yang akan menjadi pasokan modal bagi sektor pertanian mengembangkan kegiatan usahanya.

Investasi merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan untuk membeli peralatan, pertambahan barang, biaya operasional dan segala keperluan yang dimanfaatkan untuk perkembangan usaha pertanian tersebut. Dengan adanya investasi yang masuk pada sektor pertanian, akan dimanfaatkan untuk perkembangan kegiatan usaha seperti perluasan lahan dan menambah kapasitas produksi yang tentunya akan membutuhkan tenaga kerja sebagai penggerak utama dalam kegiatan usaha pertanian tersebut. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja dapat terus dilakukan sektor pertanian dan berkontribusi untuk mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara (Sukirno, 1997).

Peran pemerintah pada perkembangan sektor pertanian yang diharapkan dapat melakukan penyerapan tenaga kerja juga menetapkan besaran nilai dalam pemberian upah kepada tenaga kerja yang terdapat pada semua sektor khususnya dalam hal ini sektor pertanian. Teori Bentham menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan membantu meningkatkan kesejahteraan warganya antara lain melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Nilai upah yang diberikan kepada pekerja telah memiliki pedoman dari pihak pemerintah wilayah tersebut yang dikenal dengan sebutan Upah Minimum

Provinsi/Kabupaten yang berlaku. Dikategorikan sebagai batasan upah bulanan terendah yang diberikan kepada pekerja dengan memperhatikan produktifitas dan skala pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai pekerja di wilayah tersebut. Bentham (Pressman, 2002)

Namun dalam hal pemberian upah sering menjadi kontroversi dalam bidang ketenagakerjaan. Terkadang peningkatan upah minimum menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penyerapan tenaga kerja. Karena pada dasarnya jika upah minimum Provinsi/Kabupaten naik, pihak pelaku usaha akan meminimalkan biaya operasionalnya untuk mengantisipasi pengeluaran biaya ditahun kedepannya dengan melakukan pengurangan tenaga kerja. Secara langsung apabila pelaku usaha mengurangi pekerjanya maka jumlah pengangguran akan bertambah lagi (Sumarsono, 2003).

Dengan adanya inflasi, investasi, dan kenaikan upah minimum Provinsi yang berlaku dapat mempengaruhi naik turunnya kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Sumatera. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu perkembangan inflasi, investasi, dan upah minimum tenaga kerja.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara.

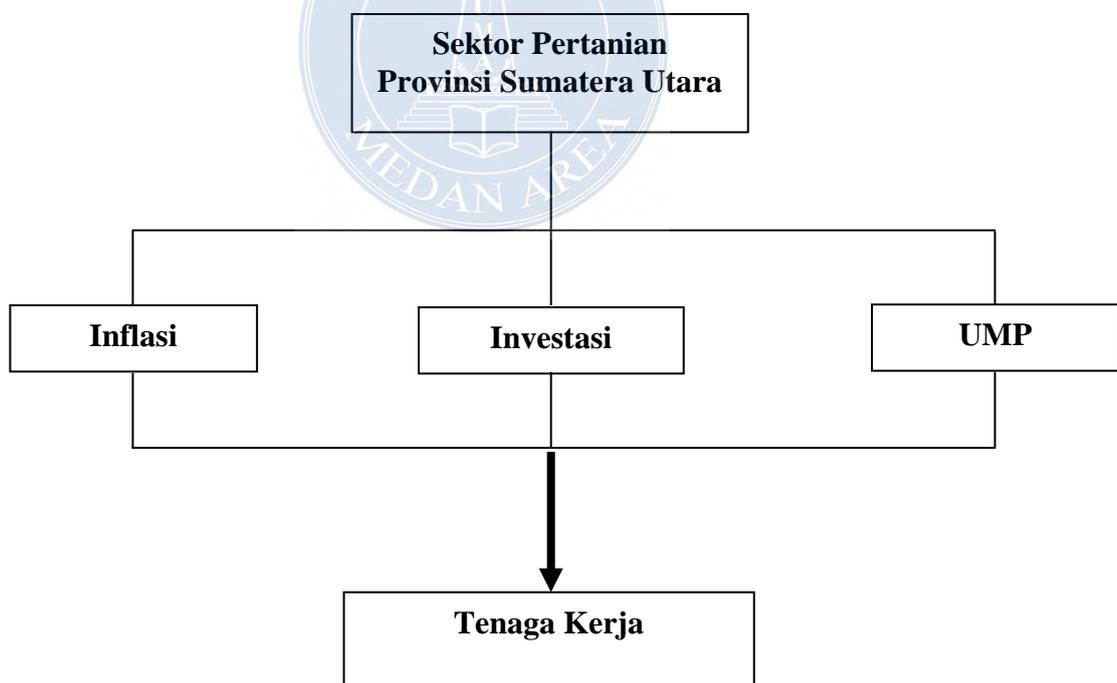
1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh inflasi, investasi, dan upah minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara.
2. Pihak lain, sebagai tambahan informasi dan pembandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan sebagai masukan bagi pihak lain yang memerlukannya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengangguran menjadi permasalahan di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sektor pertanian yang merupakan sektor berkontribusi besar menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dalam perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu inflasi investasi, dan upah minimum Provinsi yang berlaku. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 1
Kerangka pemikiran

Keterangan :

➔ : Mempengaruhi penyerapan tenaga kerja